



Dinamika Sosial-Ekonomi Nelayan Tanjung Benoa dalam Perkembangan Wisata Bahari di Bali Selatan pada Tahun 1993 – 2022

Ida Ayu Made Keshya Natania^{1*}, Anak Agung Inten Asmariati², Putu Dyah Pradnya Paramitha³

¹Program Studi Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Udayana

²Program Studi Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Udayana

³Program Studi Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Udayana

*Penulis Korespondensi: idaayukeshya@gmail.com

Abstract. *This research is entitled Socio-Economic Dynamics of Tanjung Benoa Fishermen in the Development of Marine Tourism in South Bali, 1993–2022. The study aims to examine the socio-economic changes of fishing communities, the factors driving these changes, and the implications of marine tourism development on the lives of the Tanjung Benoa community. This research employs the historical research method, including heuristics, source criticism, interpretation, and historiography. Data were collected through interviews, observations, and literature studies of written sources and archives related to the development of Tanjung Benoa. The results show that the designation of Tanjung Benoa as a marine tourism area in 1993 became the starting point for the socio-economic transformation of coastal communities. The development of marine tourism created new economic opportunities, leading many fishermen to shift their professions to tourism-related occupations such as watersport operators, tour guides, and other service businesses, which contributed to increased community income. However, these changes also led to shifts in social structure, the emergence of new economic classes, and unequal access to economic resources. In addition, there were changes in cultural values and community perspectives toward the sea, from a living space to a commercial economic space. Nevertheless, the Tanjung Benoa community continues to maintain cultural values and local traditions as the identity of coastal society. Overall, the development of marine tourism in Tanjung Benoa reflects dynamic socio-economic transformation influenced by government policies, tourism investment, and the adaptability of local communities in facing modernization and globalization.*

Keywords: *Dynamics; Fishermen; Marine; Tanjung Benoa; Tourism*

Abstrak. Penelitian ini berjudul *Dinamika Sosial-Ekonomi Nelayan Tanjung Benoa dalam Perkembangan Wisata Bahari di Bali Selatan pada Tahun 1993–2022* yang bertujuan untuk mengetahui perubahan sosial-ekonomi masyarakat nelayan, faktor pendorong perubahan, serta implikasi perkembangan wisata bahari terhadap kehidupan masyarakat Tanjung Benoa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah dengan tahapan heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi pustaka terhadap sumber tertulis serta arsip yang berkaitan dengan perkembangan Tanjung Benoa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan Tanjung Benoa sebagai kawasan wisata tirta sejak tahun 1993 menjadi titik awal transformasi sosial-ekonomi masyarakat pesisir. Perkembangan wisata bahari membuka peluang ekonomi baru sehingga banyak nelayan beralih profesi menjadi pelaku wisata seperti operator watersport, pemandu wisata, dan usaha jasa lainnya yang berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat. Namun demikian, perubahan tersebut juga menimbulkan perubahan struktur sosial, munculnya lapisan ekonomi baru, serta ketimpangan akses terhadap sumber daya ekonomi. Selain itu, terjadi perubahan nilai budaya dan cara pandang masyarakat terhadap laut dari ruang hidup menjadi ruang ekonomi komersial. Meskipun demikian, masyarakat Tanjung Benoa tetap mempertahankan nilai-nilai budaya dan tradisi lokal sebagai identitas masyarakat pesisir. Secara keseluruhan, perkembangan wisata bahari di Tanjung Benoa mencerminkan dinamika transformasi sosial-ekonomi masyarakat yang dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah, investasi pariwisata, serta kemampuan adaptasi masyarakat lokal dalam menghadapi modernisasi dan globalisasi.

Kata kunci: *Bahari; Dinamika; Nelayan; Tanjung Benoa; Wisata*

1. LATAR BELAKANG

Bali merupakan daerah dengan potensi pariwisata yang besar dengan sektor pariwisatanya yang terus melaju dan berkembang pesat. Bali dan pariwisata tidak dapat dipisahkan, Bali yang sangat terkenal sebagai tujuan bagi para wisatawan untuk berlibur, seperti di wilayah Bali ada pula beberapa daerah yang mengandalkan hasil laut seperti di Tanjung Benoa, Karangasem, Klungkung, Nusa Dua, dan banyak lainnya yang telah menjadi salah satu sektor penopang utama perekonomian Bali (Pratiwi, 2024).

Tanjung Benoa adalah salah satu wilayah yang merupakan desa nelayan yang mengalami perkembangan menjadi wisata bahari. Kawasan bahari ini merupakan kawasan yang tidak dapat dipisahkan dari wilayah kelautan, yang menjadi salah satu daya tarik wisata alam dan banyak diminati oleh wisatawan (Burhanuddin, 2003). Perkembangan pesat yang di alami Tanjung Benoa ini merupakan hasil dari efek limpahan. Lokasi ini awalnya tidak menjadi sasaran utama pembangunan, efek limpahan (*spillover effect*) dari Nusa Dua mulai terasa: akses transportasi lebih baik, suplai listrik dan air bersih meningkat, dan mulai ada peluang kerja di sektor jasa (Kallenberger, 1992).

Sepanjang kurun waktu 1990-an, aktivitas wisata bahari di Tanjung Benoa mengalami pertumbuhan sehingga puncak perkembangan wisata bahari di Tanjung Benoa dapat dikatakan terjadi pada tahun 1993, ketika kawasan ini resmi dikenal sebagai pusat wisata bahari di Bali. Pada masa inilah gagasan yang ditanamkan oleh kelompok nelayan mencapai titik klimaksnya, karena Tanjung Benoa tidak hanya menjadi tujuan wisatawan asing, tetapi juga wisatawan domestik. Popularitas berbagai wahana air menjadikan kawasan ini ikon baru dalam pariwisata Bali, setara dengan destinasi lain seperti Kuta atau Nusa Dua (Sudipa, Vipriyanti, & Yastika, 2025).

Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang terdiri dari kumpulan nelayan-nelayan serta pegiat usaha wisata di pesisir Tanjung Benoa yang bekerja sama dalam pengelolaan. KUB ini menyediakan jasa wisata air di Tanjung Benoa. Kelompok ini memfasilitasi anggota untuk bekerja sama dalam pengelolaan usaha, pembelian dan pemeliharaan peralatan, pemasaran produk, hingga pembagian keuntungan secara adil. Kelompok Usaha Bersama ini dinaungi oleh badan koperasi dan dinas perikanan (Budiarsa, Komunikasi Pribadi).

Perubahan ini membawa dampak sosial dan ekonomi yang cukup signifikan, dari sisi ekonomi, masyarakat yang bekerja di sektor wisata mulai merasakan pendapatan yang lebih stabil dibanding hasil melaut yang bergantung musim. Dari sisi sosial, interaksi dengan wisatawan domestik maupun mancanegara perlahan membentuk pola pikir baru serta memperluas wawasan masyarakat lokal (Alfiaturrohmaniah, 2020), dengan demikian, sekitaar tahun 1990 dapat dipandang sebagai tonggak awal yang membuka jalan bagi transformasi Tanjung Benoa dari desa nelayan tradisional menjadi destinasi wisata bahari yang terus berkembang (Souhuwat, 2018).

Tanjung Benoa memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan lokasi lain yang mungkin menawarkan keindahan pantai serupa namun sulit dijangkau atau berisiko ombak besar (Kardini & Sudiartini, 2020). Perkembangan Tanjung Benoa tidak dapat dilepaskan dari kebijakan pemerintah yang menata arah pembangunan pesisir Bali, yang sebelumnya didominasi oleh kegiatan nelayan tradisional kemudian menjadi kawasan bahari membuka peluang baru untuk masyarakat (Tanjung Benoa Bali Team, 2025).

Pada fase ini, banyak generasi muda nelayan meninggalkan pekerjaan melaut karena penghasilan dari pariwisata dianggap lebih cepat dan pasti. Secara sosial, generasi muda mulai meninggalkan pekerjaan melaut karena melihat pariwisata lebih menjanjikan secara finansial dan prestise. Hal ini memicu pergeseran nilai dalam masyarakat: kemampuan berbahasa asing, keterampilan melayani pelanggan, dan kepemilikan aset

pariwisata menjadi indikator status baru, menggantikan reputasi sebagai nelayan berpengalaman (Martoyo et al., 2022).

Kondisi ini mencerminkan adanya transformasi sosial-ekonomi di Tanjung Benoa, di mana masyarakat pesisir secara perlahan meninggalkan aktivitas perikanan tradisional dan beralih ke sektor pariwisata yang dinilai lebih menjanjikan secara ekonomi. Perubahan ini membawa kemajuan ekonomi, tetapi juga menciptakan perubahan, di tengah arus modernisasi dan komersialisasi laut, masyarakat Tanjung Benoa berusaha mempertahankan keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan warisan budaya.

Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam tentang sosial dan ekonomi, dengan judul penelitian *Dinamika Sosial-Ekonomi Nelayan Tanjung Benoa dalam Perkembangan Wisata Bahari di Bali Selatan Pada Tahun 1993 – 2022*. Dalam pembahasan ini, akan membahas mengenai mengapa Tanjung Benoa menjadi wisata bahari, faktor yang mendorong terjadinya perubahan sosial dan ekonomi Tanjung Benoa, serta Implikasi perubahan bagi masyarakat Tanjung Benoa, dengan demikian penelitian ini akan berfokus pada perubahan sosial-ekonomi masyarakat itu sendiri.

2. KAJIAN TEORITIS

A. Teori Perkembangan

Menurut Edi Sedyawati Perkembangan bukan hanya penambahan jumlah atau ukuran saja, tapi juga perubahan fungsi, kualitas, struktur, norma, budaya dan lain-lain (Sedyawati, n.d.). Perkembangan masyarakat bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri, melainkan hasil dari interaksi dinamis antara manusia, lingkungan sosial, dan nilai budaya yang hidup di tengah masyarakat. Perkembangan tidak semata-mata dipahami sebagai perubahan menuju modernitas dengan indikator ekonomi yang serba material, tetapi lebih jauh dipahami sebagai proses menyeluruh yang mencakup transformasi nilai, sikap, perilaku, dan struktur sosial.

Edi Sediawati menekankan bahwa perkembangan harus bersifat holistik. Holistik berarti memperhatikan seluruh dimensi kehidupan. Masyarakat yang berkembang adalah yang tidak hanya mengalami kemajuan dalam bidang infrastruktur dan teknologi, tetapi juga dalam kualitas interaksi sosial, solidaritas, serta kemampuan menjaga keseimbangan jasmani dan rohani. Perkembangan dalam arti ini bersifat kualitatif, terjadi perubahan dalam cara berpikir, sistem nilai, dan hubungan antar manusia serta kuantitatif berupa pertumbuhan jumlah, produksi, dan hasil-hasil pembangunan.

Selain itu, konsep perkembangan menurut Edi Sediawati juga sangat menekankan partisipasi masyarakat. Beliau melihat bahwa masyarakat tidak boleh diperlakukan sekadar sebagai objek yang menerima kebijakan pembangunan dari luar, melainkan sebagai subjek aktif yang memiliki potensi, pengetahuan lokal, serta kearifan budaya untuk menentukan arah perubahannya sendiri. Dalam kerangka ini, perkembangan juga dipandang sebagai proses berkelanjutan (sustainable process).

B. Teori Sejarah

Menurut R. G. Collingwood, perubahan sejarah tidak dipahami sebagai rangkaian peristiwa acak, tetapi sebagai proses yang digerakkan oleh pikiran, keputusan, dan tindakan manusia. Dalam *The Idea of History*, Collingwood menegaskan bahwa sejarah merupakan hasil dari tindakan manusia yang rasional, karena setiap perubahan muncul dari pertimbangan dan motif yang melatarbelakangi keputusan individu maupun kelompok sosial. Ia menolak pandangan positivistik yang hanya melihat fakta sebagai sesuatu yang berdiri sendiri; bagi Collingwood, memahami perubahan sejarah berarti menghidupkan kembali pikiran pelaku masa lalu (re-enactment) untuk mengetahui alasan

di balik tindakan mereka. Collingwood juga menekankan bahwa sejarah bersifat kumulatif dan berkesinambungan, di mana transformasi yang tampak besar sebenarnya dibangun dari rangkaian keputusan manusia (R.G.Collingwood, 1946).

Sejarah struktural tidak hanya menyoroti peristiwa-peristiwa besar, tetapi lebih menekankan pola mendasar yang membentuk kehidupan masyarakat, seperti pola produksi, distribusi, dan konsumsi (Kartodirdjo, 1993). Dengan kata lain, pendekatan Sartono memberikan kerangka untuk melihat perubahan ekonomi sebagai fenomena historis yang multidimensional, yang turut memengaruhi identitas, stratifikasi sosial, dan orientasi budaya masyarakat setempat. Dalam pandangan Sartono, sejarah struktural tidak hanya berfokus pada peristiwa-peristiwa besar, tetapi menyoroti pola mendasar yang membentuk kehidupan masyarakat, seperti pola produksi, distribusi, dan konsumsi. Pendekatan ini memberikan kerangka untuk melihat perubahan ekonomi sebagai fenomena historis yang bersifat multidimensional, yang turut memengaruhi identitas, stratifikasi sosial, dan orientasi budaya masyarakat setempat.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode sejarah dengan pendekatan penelitian kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data lisan dan data tertulis. Data lisan atau data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil ke lapangan dengan melakukan wawancara. Sedangkan data tertulis adalah data yang digunakan sebagai pelengkap dan pendukung setelah data lisan, yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan dan literatur artikel, buku, dan sebagainya. Instrumen penelitian pada adalah peneliti sebagai instrumen utama, kamera dan alat perekam suara. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara, observasi, dan studi dokumentasi (Fiantika, 2022). Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara bertahap mulai dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dampak Ekonomi terhadap Masyarakat

Perubahan ekonomi di kawasan Tanjung Benoa berdampak langsung terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat, khususnya nelayan, yang ditentukan oleh beberapa faktor utama seperti pendapatan, pola konsumsi, pendidikan, dan penggunaan teknologi. Pendapatan memiliki peran paling krusial karena menjadi sumber utama pemenuhan kebutuhan rumah tangga, meskipun bersifat fluktuatif akibat ketergantungan pada kondisi alam. Di sisi lain, pengelolaan konsumsi yang efektif menjadi strategi penting dalam menjaga stabilitas ekonomi keluarga, terutama saat pendapatan menurun. Selain itu, pendidikan berkontribusi dalam membuka peluang mobilitas sosial dan diversifikasi pekerjaan di luar sektor perikanan tradisional. Sementara itu, penggunaan teknologi dalam penangkapan ikan belum memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan, karena masih terbatas pemanfaatannya dan tetap dipengaruhi oleh faktor alam seperti musim dan cuaca (Sanjaya, 2024).

Pembangunan wisata pesisir yang berpotensi menimbulkan marginalisasi terhadap nelayan, terutama karena keterbatasan akses mereka terhadap kebijakan, lemahnya kapasitas modal dan teknologi, serta minimnya keterlibatan dalam proses perencanaan pembangunan. Kondisi ini menyebabkan nelayan kesulitan bersaing, tidak sepenuhnya menikmati manfaat ekonomi pariwisata, dan berpotensi mengalami tekanan sosial-ekonomi di tengah berkembangnya industri wisata Bahari (Sukmayeti, 2019).

Hal tersebut berdampak pada struktur ketenagakerjaan di Tanjung Benoa yang mengalami perubahan signifikan, di mana meskipun sektor perikanan masih menyerap tenaga kerja dalam jumlah cukup besar yaitu 314 orang, sektor perdagangan justru

menjadi yang paling dominan dengan 1.744 orang, disusul sektor jasa-jasa sebanyak 1.264 orang. Jika dibandingkan dengan sektor lain seperti angkutan dan komunikasi (401 orang) serta lembaga keuangan (211 orang), terlihat bahwa aktivitas ekonomi masyarakat telah mengalami diversifikasi dan tidak lagi bergantung sepenuhnya pada sektor tradisional, melainkan bergeser ke sektor perdagangan dan jasa yang berkembang seiring dengan pertumbuhan pariwisata di kawasan tersebut (Badan Pusat Statistik Kabupaten Badung, 2020).

Kondisi nelayan di Tanjung Bena pada tahun 1986 menunjukkan fase peralihan yang penting dalam kehidupan masyarakat setempat. Pada masa itu, sebagian besar penduduk masih bergantung pada mata pencaharian tradisional sebagai nelayan dan pencari rumput laut. Lingkungan perairan pun masih tergolong alami, dengan kondisi laut yang jernih dan belum tersentuh oleh perkembangan fasilitas wisata modern seperti olahraga air. Namun, periode ini juga menandai mulai masuknya sektor pariwisata yang perlahan mengubah struktur ekonomi desa, di mana nelayan mulai berinteraksi dengan wisatawan yang datang menikmati keindahan pantai. Aktivitas para nelayan masih menggunakan peralatan sederhana seperti perahu cadik dan jaring manual, dengan hasil tangkapan yang melimpah karena ekosistem laut masih terjaga dengan baik.

Desa Tanjung Bena tercatat adanya 935 bangunan tempat tinggal, serta bangunan yang digunakan untuk aktivitas ekonomi seperti 153 unit toko/perdagangan, 15 unit industri, 91 unit penginapan, dan 29 bangunan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa kawasan ini mengalami transformasi ekonomi yang kuat menuju sektor pariwisata dan jasa, ditandai dengan meningkatnya jumlah penginapan dan aktivitas perdagangan yang mendukung industri wisata (Badan Pusat Statistik Kabupaten Badung, 2020).

Kenaikan pendapatan masyarakat di Tanjung Bena merupakan salah satu dampak langsung dari berkembangnya aktivitas pariwisata bahari, khususnya melalui kegiatan seperti snorkeling dan watersport. Hal ini tercermin dari munculnya berbagai peluang usaha baru yang dikelola masyarakat lokal, seperti penyewaan alat snorkeling, jasa transportasi laut (boat), serta jasa fotografer bawah laut yang memberikan nilai tambah ekonomi di luar sektor perikanan tradisional. Aktivitas pariwisata tersebut tidak hanya meningkatkan pendapatan individu, tetapi juga mendorong pertumbuhan sektor jasa dan perdagangan secara lebih luas (Azzahra, 2023).

Munculnya usaha kecil dan menengah (UMKM) di Tanjung Bena merupakan bagian dari transformasi ekonomi masyarakat yang didorong oleh perkembangan pariwisata bahari, salah satunya melalui usaha water taxi. Kehadiran layanan ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana transportasi wisata, tetapi juga menjadi contoh nyata bagaimana UMKM lokal berkembang dan menjadi sumber penghidupan masyarakat. Pertemuan antara Kejaksaaan RI dan pelaku usaha *water taxi*, ditegaskan bahwa UMKM berperan sebagai tulang punggung perekonomian karena mampu menciptakan lapangan kerja, menggerakkan ekonomi lokal, serta mendukung promosi potensi wisata daerah (Redaksi Restorasi Hukum, 2025). Selain itu, penguatan UMKM di Tanjung Bena juga didukung melalui berbagai program pelatihan dan pemberdayaan yang melibatkan pemerintah, desa adat, dan pihak swasta. Salah satu contohnya adalah program pelatihan wirausaha yang diselenggarakan oleh PT Pelindo bekerja sama dengan Desa Adat Tanjung Bena dan instansi terkait, yang menyasar pelaku UMKM lokal agar mampu meningkatkan kapasitas usaha mereka (Nusa Bali, 2023).

Ketergantungan ekonomi masyarakat pesisir, termasuk di Tanjung Bena, terhadap sektor pariwisata merupakan konsekuensi dari pesatnya pengembangan kawasan wisata bahari di wilayah Kabupaten Badung. Perkembangan ini memang memberikan dampak

positif berupa peningkatan pendapatan, peluang kerja, dan keterlibatan masyarakat lokal dalam aktivitas pariwisata. Namun, di sisi lain, kondisi tersebut juga menciptakan ketergantungan yang tinggi terhadap sektor pariwisata sebagai penggerak utama ekonomi daerah. Hal ini terlihat dari dominasi kontribusi pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Badung yang sebagian besar berasal dari pajak hotel dan restoran, serta semakin berkurangnya peran sektor tradisional seperti perikanan. Akibatnya, masyarakat nelayan mulai mengalami pergeseran mata pencaharian dan bahkan terdesak oleh pembangunan fasilitas pariwisata di kawasan pesisir, sehingga aktivitas ekonomi mereka tidak lagi sepenuhnya mandiri, melainkan bergantung pada dinamika industri pariwisata yang fluktuatif (Prayogi & Sari, 2019).

Ketergantungan yang tinggi terhadap sektor pariwisata menjadikan masyarakat di kawasan wisata sangat rentan terhadap berbagai krisis dan bencana, baik yang bersifat alam, non-alam, maupun sosial (Berliandaldo, 2023). Hal ini terlihat pada krisis global seperti pandemi COVID-19. Kunjungan wisatawan, terutama pada aktivitas snorkeling, mengalami penurunan yang drastis pada periode 2020– 2021 akibat pembatasan mobilitas dan kebijakan pemerintah. Kondisi ini berdampak langsung pada menurunnya aktivitas ekonomi masyarakat yang bergantung pada sektor pariwisata, termasuk pelaku usaha watersport dan UMKM lokal (Azzahra, 2023).

Penelitian dalam jurnal *Tunas Agraria* menunjukkan bahwa menurunnya hasil tangkapan ikan akibat pencemaran laut, perubahan iklim, serta kompetisi dengan sektor pariwisata mendorong nelayan untuk tidak lagi bergantung sepenuhnya pada sektor perikanan tradisional. Sebagai respons, muncul berbagai bentuk inovasi ekonomi berbasis kearifan lokal, seperti pengembangan ekowisata, rehabilitasi mangrove, budidaya kuda laut, serta produksi olahan hasil laut. Diversifikasi ini tidak hanya berfungsi sebagai strategi bertahan hidup, tetapi juga memperkuat resiliensi sosial-ekologis masyarakat, sekaligus menjaga keberlanjutan kelembagaan tradisional seperti Bendega dalam menghadapi dinamika pembangunan pesisir (Rasyadi, 2025).

Keberadaan Watersport memberikan dampak ekonomi yang signifikan terhadap masyarakat sekitar, khususnya dalam menciptakan peluang kerja dan meningkatkan aktivitas ekonomi lokal. Selain itu, adanya peningkatan jumlah wisatawan, baik domestik maupun mancanegara, turut mendorong perputaran ekonomi di kawasan tersebut. Kehadiran wisatawan dalam jumlah kelompok, seperti kegiatan perusahaan (gathering dan outbound), semakin memperbesar potensi pemasukan ekonomi (Reni, Komunikasi Pribadi, 11 April 2026).

B. Dampak Sosial dan Budaya

Perkembangan pariwisata di kawasan Tanjung Benoa telah mendorong terjadinya transformasi sosial dalam kehidupan masyarakat, terutama melalui perubahan pola interaksi, orientasi ekonomi, serta meningkatnya keterlibatan dengan wisatawan domestik dan mancanegara, yang secara tidak langsung membentuk kecenderungan gaya hidup yang lebih modern dan adaptif terhadap dinamika global (Putra & Antari, 2026). Interaksi antara masyarakat lokal dengan wisatawan serta pelaku industri pariwisata telah membentuk dinamika sosial baru. Perubahan tersebut terlihat dalam pola kerja, gaya hidup, hingga cara masyarakat berinteraksi dengan budaya luar (Ernawati, 2011). Perubahan sosial yang paling terlihat adalah pergeseran nilai dalam pola kerja masyarakat. Pada masa ketika sebagian besar penduduk masih bergantung pada sektor perikanan, ritme kerja sangat dipengaruhi oleh kondisi alam dan musim. Nelayan biasanya menyesuaikan aktivitas melaut dengan kondisi cuaca, arah angin, serta musim ikan. Pola kerja seperti ini membuat aktivitas ekonomi masyarakat lebih fleksibel dan

bergantung pada alam (Amrina, Karyadi, & Hamdi, 2021).

Seiring berkembangnya sektor pariwisata, pola kerja masyarakat mulai berubah menjadi lebih teratur dan mengikuti jadwal industri wisata. Jika sebelumnya pekerjaan dianggap sebagai aktivitas yang mengikuti ritme alam, kini pekerjaan dipahami sebagai aktivitas profesional yang membutuhkan komitmen waktu dan tanggung jawab yang lebih jelas. Kondisi ini mencerminkan adanya transformasi nilai kerja dalam masyarakat Tanjung Benoa (Budiarsa, Komunikasi Pribadi). Selain perubahan dalam pola kerja, perkembangan pariwisata juga mempengaruhi gaya hidup masyarakat. Meningkatnya pendapatan dari sektor wisata mendorong sebagian masyarakat untuk mengadopsi pola hidup yang lebih modern (Irwan, 2025). Perubahan sosial ekonomi di kawasan Tanjung Benoa terlihat jelas melalui transformasi pola hidup masyarakat yang semakin modern, ditandai dengan perubahan bentuk hunian, pemanfaatan teknologi, serta meningkatnya kepemilikan kendaraan pribadi dan barang konsumsi. Pada masa awal perkembangan industri pariwisata, sistem pemasaran hotel masih bersifat konvensional dan didominasi oleh jaringan operator multinasional dengan kekuatan modal besar. Dominasi ini juga meluas ke berbagai kawasan wisata di Bali, termasuk Jimbaran dan Nusa Dua, serta wilayah lain seperti Kuta, Legian, Seminyak, dan Sanur yang turut diramaikan oleh jaringan hotel internasional (Kanten, 2026). Selain itu, perkembangan sektor kuliner juga menunjukkan pertumbuhan signifikan; berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Bali tahun 2019, terdapat 823 restoran dan rumah makan di Kabupaten Badung yang sebagian besar terkonsentrasi di kawasan pariwisata, termasuk Tanjung Benoa dan sekitarnya. Hal ini menunjukkan bahwa pariwisata tidak hanya mendorong perubahan gaya hidup masyarakat, tetapi juga memperluas aktivitas ekonomi lokal melalui berkembangnya sektor perhotelan dan kuliner (Kanten, 2026).

Interaksi antara masyarakat lokal dan wisatawan, baik domestik maupun mancanegara, di kawasan Tanjung Benoa merupakan faktor penting. Hubungan ini tercermin dalam aktivitas sehari-hari seperti pelayanan jasa wisata, transaksi ekonomi, hingga pertukaran budaya yang terjadi di ruang-ruang publik wisata. Masyarakat lokal tidak hanya berperan sebagai penyedia jasa (seperti pemandu wisata, *operator water sport*, dan pelaku usaha kuliner), tetapi juga menjadi aktor penting dalam menciptakan pengalaman wisata yang ramah dan berkesan bagi wisatawan. Interaksi tersebut turut mendorong keterbukaan sosial, adaptasi budaya, serta peningkatan kemampuan komunikasi, khususnya dalam penggunaan bahasa asing (Kardini & Sudiartini, 2020). Melalui interaksi tersebut, masyarakat mulai mengenal berbagai bahasa asing, terutama bahasa Inggris, yang digunakan dalam komunikasi dengan wisatawan. Banyak pekerja di sektor pariwisata yang secara tidak langsung mempelajari bahasa asing sebagai bagian dari kebutuhan pekerjaan. Kemampuan berkomunikasi dengan wisatawan menjadi salah satu keterampilan penting yang dimiliki oleh masyarakat yang terlibat dalam industri wisata (Suardana, Komunikasi Pribadi).

Pertemuan antara budaya lokal dan budaya luar juga mendorong terjadinya proses akulturasi budaya. Masyarakat tidak sepenuhnya meninggalkan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun, tetapi mulai mengadaptasi unsur-unsur baru yang dianggap sesuai dengan perkembangan zaman. Meskipun terdapat pengaruh budaya luar yang cukup kuat, masyarakat Tanjung Benoa pada umumnya tetap berupaya menjaga identitas budaya lokal mereka. Berbagai kegiatan adat dan keagamaan tetap dilaksanakan secara rutin sebagai bentuk pelestarian budaya (Budiarsa, Komunikasi Pribadi).

Keberadaan desa adat memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan tradisi dan nilai-nilai budaya masyarakat. Desa adat berfungsi sebagai lembaga sosial yang

mengatur kehidupan masyarakat berdasarkan norma dan aturan adat yang berlaku. Melalui lembaga ini, masyarakat dapat menjaga keseimbangan antara perkembangan pariwisata dengan pelestarian budaya lokal. Berbagai upacara keagamaan dan kegiatan adat tetap dilaksanakan meskipun masyarakat semakin sibuk dengan aktivitas pariwisata. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan seperti upacara di pura, kegiatan banjar, maupun tradisi keagamaan lainnya menunjukkan bahwa nilai-nilai budaya masih memiliki tempat yang kuat dalam kehidupan sosial masyarakat, dalam banyak kasus, pariwisata justru memberikan ruang bagi masyarakat untuk memperkenalkan budaya lokal kepada wisatawan. Beberapa kegiatan budaya seperti pertunjukan seni, upacara adat, dan festival lokal sering menjadi daya tarik bagi wisatawan yang ingin mengenal kebudayaan Bali lebih dekat. Pariwisata juga berperan sebagai sarana promosi budaya (Jumantini, 2025).

Perkembangan pariwisata tetap menimbulkan tantangan bagi keberlanjutan nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat. Pengaruh gaya hidup global, perubahan pola konsumsi, serta interaksi intens dengan budaya luar dapat memunculkan kekhawatiran akan terjadinya pergeseran nilai dalam masyarakat, diperlukan upaya bersama untuk menjaga keseimbangan antara modernisasi dan pelestarian budaya. Secara keseluruhan, perkembangan pariwisata di Tanjung Benoa telah membawa perubahan sosial dan budaya yang cukup signifikan dalam kehidupan masyarakat. Transformasi dalam pola kerja, gaya hidup, serta interaksi dengan wisatawan menunjukkan adanya dinamika sosial yang terus berkembang. Meskipun demikian, keberadaan adat, desa adat, serta komitmen masyarakat untuk menjaga tradisi menunjukkan bahwa identitas budaya lokal tetap bertahan di tengah perubahan yang terjadi (Rosyidin, 2024).

Masyarakat Tanjung Benoa tetap mempertahankan budayanya, hal ini terlihat pada pembangunan infrastruktur seperti jalan tol di atas laut yang tidak serta-merta menghilangkan nilai tradisional masyarakat, melainkan justru mengakomodasi praktik keagamaan, seperti penyediaan anjungan untuk pelaksanaan ritual Melasti dan pembangunan tempat suci di area tol (Tanjung Benoa Team, 2015).²⁵ Hal ini mencerminkan upaya integrasi antara pembangunan dan kearifan lokal agar aktivitas religius tetap berjalan tanpa hambatan. Selain itu, dalam konteks pariwisata, aktivitas ekonomi seperti watersport di kawasan tersebut juga menyesuaikan dengan kalender keagamaan, misalnya dengan menghentikan operasional saat Hari Raya Nyepi serta prosesi adat lainnya (Rhismawati, 2025). Di sisi lain, kekuatan budaya masyarakat juga terlihat dari konsistensi pelaksanaan upacara adat seperti Ngaben yang tetap berlangsung meskipun berdekatan dengan agenda internasional seperti KTT G20. Fenomena ini menunjukkan bahwa masyarakat lokal memiliki daya tahan budaya (*cultural resilience*) yang kuat, sehingga tradisi tidak hanya bertahan, tetapi juga mampu beradaptasi di tengah tekanan globalisasi dan perkembangan industri pariwisata (Ermalia, 2022).

C. Tantangan dan Dampak Lingkungan

Tanjung Benoa akan di kembangkan menjadi wisata bahari yang terbesar didunia (Isdarmanto, 2017). Hal ini berdampak pada ruang pesisir juga berkaitan dengan meningkatnya kebutuhan lahan untuk mendukung kegiatan pariwisata. Seiring bertambahnya jumlah usaha wisata bahari, ruang yang sebelumnya digunakan untuk aktivitas nelayan atau area alami mulai mengalami perubahan fungsi. Hal ini menyebabkan terjadinya kompetisi pemanfaatan ruang antara kepentingan ekonomi, aktivitas tradisional masyarakat, dan upaya pelestarian lingkungan. Perubahan fungsi lahan menjadi salah satu konsekuensi dari berkembangnya industri pariwisata di Tanjung Benoa. Beberapa wilayah yang sebelumnya digunakan sebagai lahan permukiman tradisional, area tambak, maupun ruang terbuka pesisir beralih menjadi kawasan wisata.

Pembangunan hotel, restoran, dan fasilitas penunjang pariwisata mendorong terjadinya transformasi penggunaan lahan secara bertahap (Saribulan, 2019).

Reklamasi di kawasan Teluk Benoa merupakan kebijakan yang menimbulkan dinamika antara dampak positif dan negatif, khususnya bagi masyarakat pesisir. Kegiatan reklamasi tetap direncanakan karena dinilai mampu memberikan manfaat ekonomi seperti perluasan lahan untuk pembangunan kawasan pemukiman, pusat komersial, industri, hingga membuka lapangan pekerjaan. Namun, di sisi lain reklamasi juga menimbulkan berbagai persoalan lingkungan seperti kerusakan ekosistem pesisir, perubahan arus laut, meningkatnya risiko banjir, serta terganggunya kehidupan masyarakat nelayan. Selain itu, kawasan Teluk Benoa memiliki nilai ekologis dan religius yang penting bagi masyarakat Bali, sehingga upaya reklamasi kerap mendapat penolakan karena dianggap mengancam keseimbangan lingkungan dan kearifan lokal. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang komprehensif agar kebijakan reklamasi tidak hanya berorientasi pada pembangunan ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek sosial, budaya, dan kelestarian lingkungan (Krisdhananjaya & Sudiarta, 2023).

Tantangan dan dampak lingkungan dalam rencana reklamasi di Teluk Benoa menjadi perhatian utama karena berpotensi mengganggu keseimbangan ekosistem pesisir, seperti merusak habitat biota laut, mengubah arus perairan, serta meningkatkan risiko abrasi dan banjir rob. Dampak tersebut tidak hanya memengaruhi kondisi lingkungan, tetapi juga mengancam mata pencaharian masyarakat lokal yang bergantung pada sektor perikanan dan wisata bahari. Selain itu, kawasan ini memiliki nilai sakral dalam kehidupan masyarakat Bali, sehingga kerusakan lingkungan juga berimplikasi pada terganggunya keseimbangan budaya dan spiritual. Oleh karena itu, reklamasi perlu dipertimbangkan secara matang dengan memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan, sosial, dan budaya (Angeline & Evelina, 2014).

Transformasi fungsi lahan tersebut memberikan dampak yang cukup kompleks bagi lingkungan, di satu sisi, pembangunan pariwisata memberikan peluang ekonomi bagi masyarakat, namun di sisi lain dapat mempengaruhi keseimbangan ekosistem pesisir. Perubahan struktur pantai, meningkatnya aktivitas manusia, serta penggunaan fasilitas wisata berpotensi mempengaruhi kualitas lingkungan apabila tidak dikelola dengan baik. Perubahan fisik lingkungan, perkembangan pariwisata juga menimbulkan ketergantungan ekonomi masyarakat terhadap sektor wisata. Banyak masyarakat yang kini menggantungkan penghasilan utama mereka dari aktivitas pariwisata, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ketergantungan ini membuat struktur ekonomi lokal menjadi sangat dipengaruhi oleh kondisi industri pariwisata (Astara, 2023).

Aktor kunci dalam pengelolaan lingkungan di Tanjung Benoa didominasi oleh pemerintah sebagai pihak yang memiliki kewenangan regulasi dan kebijakan. Pemerintah menjadi aktor paling kuat dalam mengarahkan dan mengendalikan sistem pengelolaan lingkungan. Sementara itu, masyarakat, pengusaha, dan organisasi non-pemerintah (NGO) berperan sebagai aktor pendukung yang turut berpartisipasi dalam pelaksanaan program dan pengawasan lingkungan secara kolaboratif. Perubahan yang diinginkan dari implementasi pengelolaan lingkungan ini mencakup terciptanya lingkungan yang lebih bersih dan sehat sebagai kondisi ideal kawasan wisata. Selain itu, diharapkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha terhadap pentingnya menjaga lingkungan. Perubahan lainnya adalah terbentuknya kemitraan lingkungan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, serta terwujudnya sistem pengelolaan lingkungan dan pariwisata yang berkelanjutan. Kebutuhan utama dalam pelaksanaan program pengelolaan lingkungan di Tanjung Benoa adalah tersedianya anggaran yang

memadai. Ketersediaan anggaran menjadi faktor paling krusial karena berfungsi sebagai dasar dalam mendukung seluruh aktivitas pengelolaan, mulai dari perencanaan, implementasi, hingga pengawasan program. Tanpa dukungan pendanaan yang kuat, berbagai upaya pengelolaan lingkungan akan sulit berjalan secara optimal dan berkelanjutan (Sudipa et al., 2025).

Masyarakat Tanjung Benoa memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap ancaman gempa dan tsunami karena letaknya di kawasan pesisir yang berbatasan langsung dengan Selat Bali dan Samudra Hindia. Namun demikian, masyarakat setempat tidak hanya bersifat pasif terhadap risiko tersebut, melainkan mampu membangun resiliensi berbasis kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Melalui pendekatan etnoekologi, adaptasi masyarakat diwujudkan dalam praktik kehidupan sehari-hari yang berlandaskan konsep Tri Hita Karana, yakni menjaga harmoni antara manusia dengan Tuhan, sesama, dan lingkungan.

Kesiapsiagaan bencana juga diperkuat melalui kolaborasi multipihak (pentahelix), pemanfaatan pengetahuan lokal, serta pengorganisasian komunitas seperti Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB). Pengakuan sebagai *tsunami ready community* oleh UNESCO/IOC semakin menegaskan bahwa integrasi antara kearifan lokal dan pendekatan modern menjadi kunci dalam membangun ketangguhan masyarakat pesisir yang berkelanjutan (Jumantini, 2025).

Selain dampak lingkungan, kegiatan wisata watersport sebagai bagian dari pariwisata bahari memiliki berbagai permasalahan yang berkaitan dengan tingginya risiko kecelakaan serta belum optimalnya tanggung jawab pengelola terhadap wisatawan. Permasalahan tersebut mencakup keterbatasan perlindungan keselamatan, kurangnya pemberian informasi yang akurat sebelum aktivitas, serta implementasi asuransi yang belum sepenuhnya mampu menanggung kerugian wisatawan. Selain itu, faktor eksternal seperti kondisi cuaca, arus laut, dan lingkungan perairan, serta faktor internal seperti kesiapan fisik dan keterampilan wisatawan, turut memengaruhi tingkat risiko dalam aktivitas watersport. Kurangnya komunikasi dan edukasi keselamatan dari pihak pengelola juga berpotensi menimbulkan kesalahan tindakan saat situasi darurat (Yolanda, Sugiarta, & Suryani, 2025).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai perkembangan masyarakat pesisir di Tanjung Benoa dari nelayan tradisional menuju kawasan wisata bahari pada tahun 1993–2022, dapat disimpulkan bahwa perubahan yang terjadi bukan sekadar pergeseran ekonomi, melainkan transformasi sosial yang menyeluruh. Penetapan Tanjung Benoa sebagai kawasan wisata tirta melalui kebijakan pemerintah pada tahun 1993 menjadi titik awal perubahan yang signifikan terhadap struktur kehidupan masyarakat pesisir. Nelayan yang sebelumnya bergantung pada hasil tangkapan laut mulai beralih atau menambah pekerjaan di sektor pariwisata, seperti operator *watersport*, pemandu wisata, maupun pelaku usaha jasa lainnya. Meskipun demikian, masyarakat Tanjung Benoa tetap berupaya mempertahankan praktik budaya dan ritual keagamaan yang berkaitan dengan laut sebagai bagian dari identitas kultural mereka. Secara keseluruhan, perkembangan Tanjung Benoa dari desa nelayan tradisional menjadi destinasi wisata bahari mencerminkan proses perubahan sosial-ekonomi yang bersifat dinamis dan berkelanjutan. Dengan demikian, Tanjung Benoa dapat dipahami sebagai contoh nyata bagaimana masyarakat pesisir mengalami perubahan dalam menghadapi arus modernisasi dan globalisasi, tanpa sepenuhnya meninggalkan identitas budaya yang dimiliki.

DAFTAR REFERENSI

- Alfiaturohmaniah. (2020). Kesesuaian Wisata Bahari di Pantai Tanjung Benoa, Provinsi Bali. *Jurnal IPTEK Terapan Perikanan Dan Kelautan*, 1(1), 19.
- Amrina, L., Karyadi, L. W., & Hamdi, S. (2021). Perubahan Sosial dan Respon Masyarakat Lokal Akibat Perkembangan Pariwisata di Desa Sapit, Lombok Timur. *RCS: Religion, Culture and State Journal*, 1(1), 133–162.
- Angeline, M., & Evelina, L. W. (2014). Bingkai Pemberitaan Reklamasi Teluk Benoa, Bali 1–10 Agustus 2013. *Humaniora*, 5(2), 803–815.
- Astara, I. W. W. (2023). *Dekonstruksi Hukum Penguatan Desa Adat dalam Pengelolaan Ekowisata di Bali Berbasis Hukum Adat dan Kearifan Lokal*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Azzahra, A. F. (2023). Strategi Pengembangan Wisata Snorkeling di Pantai Tanjung Benoa, Bali. *Journal of Marine and Aquatic Sciences*, 9(2), 205–216.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Badung. (2020). *Kecamatan Kuta Selatan dalam Angka 2020*. Badung: Badan Pusat Statistik.
- Berliandaldo, M. (2023). Kebijakan Pengembangan Pariwisata Tangguh Bencana Melalui Kolaborasi dan Manajemen Pariwisata Kebencanaan Terintegrasi. *Jurnal Abdimas Pariwisata*, 4(1), 63–73.
- Burhanuddin, S. (2003). *Sejarah Maritim Indonesia: Menelusuri Jiwa Bahari Bangsa Indonesia dalam Proses Integrasi Bangsa: Sejak zaman Prasejarah hingga abad XVII*. Semarang: Pusat Kajian Sejarah dan Budaya Maritim Asia Tenggara.
- Ermalia, A. A. U. (2022). Ngaben Massal di Desa Adat Tanjung Benoa Tetap Berlangsung saat G20. Retrieved March 21, 2026, from Bali.IDNtimes.com website: <https://bali.idntimes.com>
- Ernawati, N. M. (2011). Pengaruh Pariwisata terhadap Kehidupan Sosial Budaya Pesisir di Kawasan Taman Nasional Bali Barat dan Taman Wisata Pulau Menjangan. *Sabda*, 6(1), 69–74.
- Fiantika, F. R. (2022). *Metodologi penelitian kualitatif*. Padang: PT Global Eksekutif Teknologi.
- Irwan, I. (2025). Analisis Dampak Pengembangan Pariwisata terhadap Ekonomi Masyarakat di Desa Lantan Kec. Batukliang Utara, Kab. Lombok Tengah. *Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 4(4), 414–422.
- Isdarmanto. (2017). *Dasar-Dasar Kepariwisata dan Pengelolaan Destinasi Pariwisata*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo.
- Jumantini, N. N. E. (2025). Kearifan Lokal Masyarakat Tanjung Benoa sebagai Modal Resiliensi Gempa dan Tsunami. *Sunari Penjor: Journal of Anthropology*, 9(1), 1–12.
- Kallenberger, E. I. and M. (1992). *An Integrated Approach to Resort Development*. Bali: Bali Tourism Development Corporation.
- Kanten, I. K. (2026). Inovasi Operator Hotel Lokal dalam Mengelola Hotel & Villa di Bali. *Inovasi Dalam Hospitality*. Retrieved from <https://p3m.ppb.ac.id>
- Kardini, N. L., & Sudiartini, N. W. A. (2020). Faktor yang Mempengaruhi Daya Tarik Wisatawan dalam Pengembangan Pariwisata Bahari di Pantai Tanjung Benoa. *Jurnal Ilmiah Satyagraha*, 3(1), 122–123.
- Kartodirdjo, S. (1993). *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Krisdhananjaya, P. K., & Sudiarta, I. K. (2023). Reklamasi Perluasan Tanah di Wilayah Teluk Benoa Provinsi Bali yang Merugikan Penduduk Pesisir Pantai. *Jurnal Kertha Desa*, 11(6), 2660–2669.
- Martoyo, A., Satriani, D., Ma'arif, M., Prasetya, P., Nuryanto, U. W., Sofiyah, S., ... Komariah, N. S. (2022). *Peningkatan ekonomi desa wisata Tanjung Lesung*. Tangerang: Pustaka Kreasi Mandiri.
- Nusa Bali. (2023). Beri Pelatihan Usaha, Pelindo Perkuat UMKM di Tanjung Benoa. Retrieved

- March 20, 2026, from NusaBali website: <https://www.nusabali.com>
- Pratiwi, I. G. A. M. A. M. A. (2024). Analisis Pengaruh Faktor Pariwisata Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Bali. *Jurnal Ganec Swara*, 18(1), 485–486.
- Prayogi, P. A., & Sari, N. L. K. J. P. (2019). Pengembangan Daerah Pesisir dengan Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Kawasan Pesisir Kabupaten Badung. *Pengembangan Daerah Pesisir Dengan Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Kawasan Pesisir Kabupaten Badung*, 3(1), 17–28.
- Putra, I. W. C. M., & Antari, N. P. B. W. (2026). Analysis of Tanjung Benoa Customary Village Policies Implementation in Sustainable Marine Tourism Management. *International Journal of Glocal Tourism*, 7(1), 17–26.
- R.G.Collingwood. (1946). *The Idea Of History*. St. Andrews: Oxford University Press.
- Rasyadi, A. (2025). Politik Tata Ruang Pesisir dan Resiliensi Hukum Adat: Studi Kasus Kelembagaan Bendega dalam Pusaran Pembangunan Pariwisata Bali. *Tunas Agraria*, 8(3), 435–456.
- Redaksi Restorasi Hukum. (2025). Kejaksaan RI Tegaskan Komitmen Dukung UMKM Lewat Pertemuan dengan Pelaku Usaha Water Taxi di Tanjung Benoa. Retrieved July 25, 2025, from Restorasi Hukum website: <https://restorasihukum.com>
- Rhismawati, N. L. (2025). Tol Bali Dilengkapi Anjungan Ritual Melasti. Retrieved March 21, 2026, from ANTARA News Bali website: <https://bali.antaranews.com>
- Rosyidin, A. L. (2024). Dampak Pariwisata Terhadap Kondisi Perubahan Sosial Masyarakat Suranadi. *WISSEN: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2(3), 271–280.
- Sanjaya, P. K. A. (2024). Determinan Kesejahteraan Keluarga Nelayan di Desa Tanjung Benoa Kabupaten Badung, Bali. *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 12(2), 334–340.
- Saribulan, M. D. A. T. dan N. (2019). Konflik Kepentingan Dalam Kebijakan Reklamasi Kawasan Teluk Benoa Provinsi Bali Kajian tentang Konsep Tri Hita Karana. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 2(2), 127–145.
- Sedyawati, E. (n.d.). *Budaya Indonesia:Kajian Arkeologi, Seni dan Sejarah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Souhuwat, E. M. (2018). Pengelolaan Wisata Tirta pada PT. Benoa Marine Recreation (BMR) Kelurahan Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung. *Jurnal Harian Regional*, 5(2).
- Sudipa, I. N., Vipriyanti, N. U., & Yastika, P. E. (2025). Environmental Management Model for Tanjung Benoa Tourism Attraction. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 23, 560–563.
- Sukmayeti, E. (2019). Permasalahan Nelayan Tradisional dalam Pembangunan Pariwisata Pesisir. *Society (Jurnal Ilmu Sosial)*, 7(2), 132.
- Tanjung Benoa Bali Team. (2025). History of Tanjung Benoa Watersport Bali. Retrieved September 5, 2025, from Tanjung Benoa Bali.com website: <https://tanjungbenoabali.com/>
- Tanjung Benoa Team. (2015). Pengumuman: Aktifitas Jelang Nyepi 2015.
- Yolanda, N. M. N. R., Sugiarta, I. N. G., & Suryani, L. P. (2025). Implementasi Pertanggungjawaban Pihak Pengelola Watersport Terhadap Wisatawan Akibat Kecelakaan di Pantai Tanjung Benoa. *Jurnal Analogi Hukum*, 7(3), 361–367.